

Strategi Migrasi Open Source di Lingkungan Pemerintah Daerah

Oleh : M. Akbar Pahla KS. *

Setidaknya ada dua alasan mengapa kita memerlukan strategi untuk melakukan proses migrasi open source di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). Yang pertama adalah karena jumlah komputer yang akan dimigrasi bukanlah satu atau dua buah PC saja, tapi bisa jadi ratusan atau bahkan mungkin di atas angka 1000. Sebagai contoh, jika suatu Pemda memiliki 30 Instansi dan 30 Kecamatan, dimana masing-masing Instansi memiliki 20 PC dan masing-masing Kecamatan memiliki 5 PC, maka jumlah seluruh PC di Pemda tersebut adalah 750 PC !

Yang kedua adalah proses migrasi ini bukanlah suatu proses yang hanya dilakukan untuk mengganti platform Operating System (OS) dan aplikasi lainnya ke platform Open Source belaka. Namun lebih jauh daripada itu, proses migrasi ini merupakan proses perubahan paradigma dan kebiasaan.

Perubahan paradigma terjadi pada saat kita harus menyadari bahwa software adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sehingga penggunaan atau pemanfaatannya haruslah tunduk pada peraturan perundang-undangan di maksud. Dengan kata lain, kita tidak boleh seenaknya menggunakan suatu software tanpa memiliki izin dari pemegang hak cipta dari software tersebut, atau apa yang sering disebut dengan istilah lisensi. Tanpa adanya perubahan paradigma tersebut, maka akan sulit untuk dapat mencapai kondisi yang di harapkan, karena tidak adanya dukungan yang kuat dari semua pihak.

Sedangkan perubahan kebiasaan terjadi karena adanya perubahan software yang biasa digunakan oleh pengguna. Dimana perubahan ini menuntut adanya upaya untuk mempelajari software baru tersebut. Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya proses migrasi ini dilakukan, maka perubahan kebiasaan ini hanya akan menjadi alasan untuk menolak proses migrasi ini.

Nah, dua hal di atas mengakibatkan proses migrasi dalam suatu organisasi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga kita memerlukan suatu strategi agar proses migrasi ini dapat berjalan dengan lancar. Hal itulah yang mendorong penulis untuk menyajikan alternatif strategi migrasi dimaksud pada artikel ini, yang secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Pra Migrasi, Pelaksanaan Migrasi, dan Pasca Migrasi.

1. Pra Migrasi

Tahap ini merupakan tahap persiapan migrasi, dimana pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

1.1. Membangun Komitmen

Komitmen yang kuat merupakan fondasi dari proses migrasi ini. Komitmenlah yang membuat kita bertahan dalam menghadapi badai masalah yang mungkin menerpa. Semakin kuat komitmen yang kita miliki, maka semakin kuat pula motivasi untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan, demikian pula sebaliknya.

Kemudian siapa yang harus berkomitmen ? Semua unsur di Pemda, mulai dari pucuk pimpinan tertinggi sampai pelaksana di masing-masing unit kerja. Tentu saja, titik berat komitmen ada di pucuk pimpinan tertinggi, dalam hal ini Kepala Daerah, kerena semua kebijakan pada akhirnya akan bermuara di sini.

Lantas bagaimana caranya membangun komitmen ini ? Menurut hemat penulis, ada 2 hal yang dapat kita lakukan untuk membangun komitmen ini, yaitu :

Pertama, beri pemahaman yang tepat akan urgensi proses migrasi ini. Beri pemahaman kenapa kita harus melakukan migrasi. Beri pemahaman pula, apa keuntungan jika kita migrasi, dan apa resikonya jika kita tidak melakukan migrasi.

Kedua, diperlukan kesungguhan yang tinggi dari Instansi Pengelola TIK sebagai leading sector dalam proses migrasi ini, yang diwujudkan dalam bentuk persiapan-persiapan baik teknis maupun non-teknis, sehingga diharapkan kesungguhan ini dapat menimbulkan kepercayaan dari pihak lain yang akan terlibat dalam proses migrasi ini. Dengan adanya kepercayaan ini, diharapkan pihak-pihak lain tersebut dapat membantu mensukseskan proses migrasi ini, atau setidaknya diharapkan akan mengurangi resistansi dari para pengguna.

Komitmen yang telah terbentuk haruslah dituangkan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konkrit. Misalnya, dengan adanya kebijakan-kebijakan pimpinan untuk mendukung proses migrasi ini secara legal formal melalui keputusan atau peraturan Kepala Daerah. Sehingga lebih jelas bagaimana komitmen itu dapat memetakan peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses migrasi ini.

1.2. Menghitung Potensi Kekuatan dan Kelemahan

Pejuang sejati adalah pejuang yang bukan saja mengenal kekuatan dan kelemahan musuh, tapi ia pun menyadari sepenuhnya kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Jika proses migrasi ini boleh diibaratkan sebagai medan pertempuran, maka mengenali potensi diri dan potensi kendala yang mungkin dihadapi adalah langkah awal dalam menyusun strategi perang. Pada kesempatan ini penulis akan melihat kekuatan dan kendala ini dari sudut pandang internal dan eksternal pemda.

1.2.1. Faktor Internal

Untuk mengenali apa saja yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dari sisi internal Pemda, maka perlu dilakukan proses inventarisasi potensi TIK di lingkungan Pemda. Kegiatan inventarisasi ini, diharapkan kita dapat memetakan potensi TIK, yang sekurang-kurangnya memetakan aspek hardware/infrastruktur, software/sistem informasi, dan SDM yang dimiliki.

Dengan inventarisasi ini, kita dapat mengetahui sampai sejauh mana kekuatan TIK yang dimiliki, seperti berapa PC yang memiliki spesifikasi yang memadai, berapa PC yang telah memiliki software legal, berapa jumlah SDM teknis yang dapat diberdayakan, dll.

Dengan inventarisasi ini pula kita dapat sekaligus mengetahui kelemahan yang diperkirakan akan menjadi batu sandungan bagi proses migrasi, misalnya berapa PC yang memiliki spesifikasi yang rendah, berapa PC yang masih menggunakan software yang belum legal, berapa jumlah aplikasi yang tidak dapat running di atas platform open source, berapa jumlah SDM yang belum memiliki kemampuan dasar TIK, dll.

1.2.2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses migrasi yang berasal dari lingkungan luar sistem. Faktor eksternal ini dapat berupa kebijakan Pemerintah Pusat, baik berupa regulasi maupun bantuan, bisa pula berupa dorongan baik berupa tekanan atau dukungan dari komponen-komponen masyarakat seperti LSM, komunitas, lembaga pendidikan, dll.

Kepekaan kita dalam menangkap “sinyal-sinyal” potensi eksternal sistem menjadi faktor penentu untuk dapat memberdayakan faktor eksternal tersebut bagi keberhasilan proses migrasi ini. Dan kata networking/jaringan atau dikalangan umat muslim dikenal juga dengan istilah silaturahmi, menjadi kata kunci untuk mengasah kepekaan kita terhadap lingkungan sistem.

Dengan jaringan yang telah kita bentuk, maka kita akan lebih mudah mengenali opportunities atau peluang-peluang yang ada. Misalnya, sejauh mana Pemerintah Pusat mendukung proses migrasi ini, atau kemungkinan-kemungkinan pemberdayaan komponen-komponen masyarakat dalam proses migrasi ini.

Dengan jaringan ini pula, kita akan lebih mudah mengenali threat atau ancaman dari lingkungan sistem yang berpotensi menjadi kendala dalam proses migrasi ini. Misalnya, masih ada kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang kontra-produktif dengan kebijakan migrasi open source ini sehingga berpotensi menjadi kendala bagi proses migrasi ini. Hal ini bisa dilihat misalnya dengan masih adanya beberapa Aplikasi/Sistem Informasi yang harus digunakan di Daerah, tapi tidak bisa running di atas platform open source.

1.3. Perencanaan Proses Migrasi

Agar proses migrasi ini dapat berjalan dengan lancar dan sistematis, maka kita perlu menyusun perencanaan migrasi. Dimana perencanaan ini sekurang-kurangnya memuat objective/Tujuan, tengat waktu, dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Point 1.1. (Membangun Komitmen) dan point 1.2. (Menghitung Potensi Kekuatan dan Kelemahan) menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan proses migrasi. Point-point tersebut diharapkan dapat memberikan landasan pertimbangan baik teknis maupun nonteknis dalam menyusun rencana migrasi ini.

1.3.1. Pembentukan Tim Migrasi

Walaupun kegiatan migrasi ini ditujukan untuk kepentingan semua pihak, pada tatanan prakteknya tetap perlu dibentuk tim migrasi, yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk merealisasikan proses migrasi ini.

Tim migrasi ini bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan migrasi dan memastikan bahwa setiap tahap telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi.

Tim ini idealnya terdiri dari semua unsur SKPD di lingkungan Pemda. Kenapa ? Kerena migrasi open source ini dilakukan terhadap seluruh SKPD, sehingga dengan melibatkan unsur-unsur SKPD diharapkan implementasi di SKPD terkait dapat dibantu oleh anggota tim migrasi dari SKPD yang bersangkutan.

Teknis pembentukan tim ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, namun pada prinsipnya tim ini haruslah menggambarkan secara tegas siapa yang menjadi penanggung jawab umum, penanggungjawab teknis, sekretariat, tim migrasi inti (SKPD Pengelola TIK) dan pendukung (SKPD-SKPD) serta Tim Help Desk.

1.3.2. Skenario migrasi

Selain menentukan objective atau target dan tengat waktu yang akan dicapai, maka hal penting lainnya yang perlu kita lakukan adalah pemilihan skenario migrasi. Setidaknya ada tiga buah skenario migrasi yang dapat kita pertimbangkan, diantaranya adalah :

a. Full Pihak Ketiga

Skenario ini memanfaatkan sepenuhnya pihak ketiga dalam proses migrasi ini. Semua tahapan migrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi seluruhnya dilakukan oleh pihak ketiga.

Keuntungan skenario ini adalah profesionalitas, baik dari sisi hasil maupun dari sisi proses pelaksanaannya. Target yang telah ditentukan pun kemungkinan besar dapat dicapai pada waktunya.

Di sisi lain, kerugian dari skenario ini adalah besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemda untuk kegiatan migrasi ini. Di bawah ini adalah contoh perkiraan perhitungan bagi skenario ini.¹

Contoh Perhitungan Perkiraan Biaya Proses Migrasi

1. Sosialisasi	=	60 Peserta	x Rp.	50,000	= Rp.	3,000,000
		2 Narasumber	x Rp.	500,000	= Rp.	1,000,000
2. Pelatihan Operator	=	120 Peserta	x Rp.	100,000 x 2 Pelatihan	= Rp.	24,000,000
		2 Instruktur	x Rp.	500,000 x 2 Pelatihan	= Rp.	2,000,000
3. Pelatihan Admin	=	60 Peserta	x Rp.	200,000 x 2 Pelatihan	= Rp.	24,000,000
		2 Instruktur	x Rp.	750,000 x 2 Pelatihan	= Rp.	3,000,000
4. Instalasi OSS	=	750 PC	x Rp.	200,000	= Rp.	150,000,000
5. Pendampingan	=	60 SKPD	x Rp.	2,000,000 x 2 Bulan	= Rp.	240,000,000
				TOTAL	Rp.	447,000,000

Komponen biaya di atas adalah komponen biaya minimal untuk melaksanakan skenario ini. Karena dalam prakteknya mungkin saja komponen biaya ini akan bertambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada, misalnya kebutuhan akan portabilitas baik untuk sistem informasi, (kompatibilitas) hardware, atau data.

Dengan demikian skenario ini hanya cocok bagi Pemda yang memiliki keleluasaan dalam hal anggaran namun memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas atau kompetensi SDM IT.

b. Full SDM Internal

Jika skenario yang pertama memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam proses migrasi ini, maka di skenario yang kedua ini adalah sebaliknya. Skenario ini mencoba mengoptimalkan potensi SDM internal/lokal seluas-luasnya.

Keuntungan dari skenario ini adalah efisiensi biaya migrasi. Dengan skenario ini beberapa komponen berapa yang muncul pada skenario sebelumnya (full pihak ketiga) bisa direduksi (atau bahkan dihilangkan) seperti biaya-biaya instalasi OSS, pendampingan, help desk, sosialisasi, honor narasumber, honor instruktur, dll.

Namun tentu saja karena skenario ini sangat bertumpu pada kemampuan SDM lokal. Sehingga keberlangsungannya pun sangat tergantung pada sampai sejauh mana kesiapan SDM lokal untuk melaksanakan setiap tahap dalam proses migrasi ini.

¹ Angka sebenarnya bisa lebih besar atau lebih kecil dari contoh perhitungan ini.

Kecuali dapat merubah pola pikir, pola kerja, dan mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan, menurut hemat penulis skenario ini akan terasa berat untuk dilaksanakan, terlebih apabila target waktu yang diberikan sudah sangat dekat (misalnya < 1 tahun).

c. Kolaborasi

Skenario yang satu ini adalah skenario jalan tengah dari 2 skenario sebelumnya. Dengan skenario ini, kita mencoba mengambil semua advantages dari skenario-skenario sebelumnya berdasarkan kondisi real yang ada.

Pada skenario ini, peran dari masing-masing pihak baik itu pihak internal (Pemda, komunitas, dll) maupun pihak ketiga dioptimalkan, dengan tujuan agar Pemda dapat mencapai target migrasi pada waktu yang telah ditetapkan secara profesional tapi dengan alokasi anggaran yang se-efisien mungkin.

Disamping itu, salah satu keuntungan lain dari skenario ini adalah terjadinya percepatan peningkatan kapasitas SDM IT lokal/internal. Hal ini dimungkinkan karena adanya upaya bersama untuk melakukan proses migrasi dengan pihak ketiga, sehingga diharapkan transfer ilmu dan teknologi dapat dilakukan secara bersamaan.

Tahap-tahap mana saja yang dapat ditawarkan kepada pihak ketiga tentu saja sangat bervariasi antar satu Pemda dengan Pemda lainnya, karena sekali lagi hal ini disesuaikan dengan kesiapan SDM Pemda dimaksud.

Disamping faktor kesiapan SDM lokal, ada beberapa hal lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan skenario-skenario di atas, diantaranya adalah :

- Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran untuk mendukung proses migrasi ini sangat menentukan skenario mana yang akan kita ambil. Alokasi anggaran yang sangat terbatas akan mempersempit pilihan terhadap skenario migrasi di atas, demikian juga sebaliknya.

- Analisa Hasil Inventarisasi Potensi TIK

Analisa hasil inventarisasi potensi TIK akan memberikan gambaran kondisi potensi TIK di lingkungan Pemda ybs saat ini. Dari sini pula kita dapat mengetahui gambaran kesiapan SDM lokal untuk menghadapi proses migrasi dimaksud.

1.3.3. Penyelarasan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya kebijakan yang kontra-produktif, misalnya jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan pengadaan hardware atau sistem informasi yang tidak sesuai dengan "ruh" migrasi open source ini.

1.3.4. Penjadwalan

Tahap terakhir dalam proses perencanaan migrasi ini adalah proses penjadwalan. Proses penjadwalan ini adalah proses pemetaan antara objective, tengat waktu, dan tahapan-tahapan migrasi. Dengan penjadwalan ini diharapkan target migrasi dapat di capai tepat pada waktunya dengan cara yang sistematis.

Penjadwalan ini pun bisa kita gunakan sebagai indikator untuk mengetahui sejauh mana proses migrasi ini dilakukan. Atau dengan kata lain dengan penjadwalan ini, kita dapat mengetahui apakah proses migrasi ini bisa dikatakan berhasil atau tidak.

Untuk itu penjadwalan ini haruslah dibuat measurable dan realistis. Measurable dalam artian masing-masing tahap haruslah dapat di ukur. Dan realistis dalam artian bahwa pencapaian dan pelaksanaan setiap tahap haruslah sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada.

Proses migrasi open source ini merupakan proses perubahan sistem yang sangat mendasar. Oleh karena itu maka proses ini perlu dilakukan secara bertahap. Proses migrasi secara besar-besaran di khawatirkan akan menyebabkan chaos.

2. Pelaksanaan Migrasi

Pada prinsipnya, tahap pelaksanaan migrasi ini adalah implementasi dari hasil tahap sebelumnya, yaitu tahap pra migrasi. Pada tahap ini kita akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan untuk dilakukan. Semakin matang suatu perencanaan, maka semakin jelaslah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan migrasi ini, di antaranya :

2.1. Standard Operating Procedure (SOP)

SOP migrasi dibuat untuk memastikan bahwa pelaksanaan teknis proses migrasi ini sesuai dengan prosedur baku dan menghindari semaksimal mungkin resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam proses migrasi ini. Oleh karena itu, para pelaksana teknis di lapangan, haruslah mengikuti SOP ini secara benar, sehingga proses migrasi dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

SOP ini selain dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan migrasi ini, SOP dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana caranya melakukan proses migrasi ini. Sehingga semakin jelas langkah-langkah yang termuat dalam SOP ini, maka semakin mudah para pembaca SOP untuk mengikutinya.

2.2. Persiapan Teknis

Yang dimaksud dengan persiapan teknis di sini adalah segala persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan migrasi secara teknis. Persiapan teknis ini dilakukan guna mempermudah proses pelaksanaan migrasi dan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan teknis yang mungkin timbul di lapangan.

Apa saja yang perlu dilakukan dalam persiapan teknis ini, tentu saja sangat tergantung pada SOP yang ada. Namun penulis menyarankan, bahwa secara teknis kita perlu mempersiapkan semua kebutuhan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan :

- Backup dan Restore Data, seperti External HDD, External CD ROM Writer, dll.
- Instalasi OS, seperti berbagai Distro Linux, Repository.
- Driver-driver periperhal yang tidak secara default terdeteksi oleh OS standar.

2.3. Dokumentasi Migrasi

Dokumentasi merupakan hal yang penting dalam proses migrasi ini. Melalui dokumentasi yang baik, kita bukan saja dapat membuat suatu laporan kegiatan, namun lebih dari itu, dokumentasi dapat digunakan sebagai bahan analisa untuk keperluan pengambilan keputusan.

Disamping itu, dokumentasi sama halnya seperti SOP, dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman di masa lalu melalui dokumentasi ini, sehingga kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya.

3. Pasca Migrasi

Tahap pasca migrasi ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian proses migrasi ini. Tahap ini diperlukan untuk memastikan bahwa hasil dari tahap-tahap sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan keinginan secara berkesinambungan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini, diantaranya adalah :

3.1. Regulasi Pendukung

Regulasi pendukung merupakan realisasi dari komitmen yang telah disepakati bersama. Regulasi pendukung ini menggambarkan kebijakan-kebijakan pimpinan yang wajib dipedomani oleh segenap unsur Pemda. Dengan adanya regulasi pendukung ini diharapkan implementasi open source di lingkungan Pemda dapat berjalan secara berkesinambungan.

Regulasi ini pada umumnya berbentuk suatu peraturan Kepada Daerah. Namun bila diperlukan dapat pula ditetapkan peraturan-peraturan di bawahnya untuk mengatur detail pelaksanaan kebijakan migrasi ini.

Materi dari regulasi ini setidaknya memuat tentang kebijakan dan dukungan pimpinan terhadap proses migrasi ini. Tugas, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing SKPD, standarisasi, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran proses migrasi tadi.

Regulasi-regulasi ini pun harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan pada umumnya dan pembangunan atau pengembangan TIK di daerah khususnya. Jangan sampai perencanaan pengembangan TIK di daerah bertentangan dengan regulasi-regulasi ini.

3.2. Help Desk

Berpindah dari suatu platform sistem ke platform sistem lainnya, bagi sebagian kalangan bukanlah sesuatu yang mudah. Perubahan platform ini, setidaknya akan mengakibatkan perubahan cara kerja mereka.

Resistensi akan muncul karena beberapa sebab, diantaranya adalah adanya kekhawatiran para pengguna akan terganggunya rutinitas pekerjaan mereka, yang bisa saja disebabkan karena ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan sistem yang baru atau karena permasalahan teknis lainnya yang mengakibatkan rutinitas mereka terganggu.

Untuk mengeliminir permasalahan diatas, selain pelatihan, ada satu cara yang bisa di tempuh, yaitu menyediakan layanan help desk. Help desk ini merupakan layanan yang di berikan kepada pengguna untuk membantu menyelesaikan permasalahan teknis yang mereka temui dalam pemakaian sistem yang baru ini.

Dengan adanya help desk ini diharapkan para pengguna merasa nyaman dalam melakukan proses adaptasi ini. Lebih lanjut, dengan adanya rasa aman, diharapkan hal ini dapat menanamkan benih-benih kepercayaan para pengguna kepada tim migrasi.

Pada prinsipnya, layanan help desk ini haruslah menggunakan media yang memungkinkan para pengguna mengaksesnya secara mudah. Misalnya dengan menggunakan media seperti via telp, sms, e-mail, forum, atau media lainnya.

Selain media layanan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen layanan itu sendiri. Bagaimana keluhan itu dikelola (dicatat, dilayani, dan didokumentasikan) menjadi faktor penentu atas kepuasan para pengguna. Semakin baik pengelolaan keluhan ini, maka semakin terbuka pula kesempatan untuk mendapatkan respon yang baik terhadap proses migrasi ini dari para pengguna.

Kegagalan dalam mengelola layanan help desk ini dapat berakibat fatal terhadap proses migrasi secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena kegagalan tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan para pengguna terhadap proses migrasi ini.

3.3. Evaluasi Migrasi

Evaluasi merupakan suatu mekanisme untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan di masa yang akan datang. Dengan evaluasi ini kita mencoba mengukur diri sampai sejauh mana pencapaian yang diraih dalam proses migrasi ini.

Dengan mengacu kepada indikator-indikator yang telah ditetapkan maka kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang belum tercapai. Dari sana kita elaborasi kenapa hal tersebut tidak dapat dicapai, apakah karena faktor internal ? atau eksternal ? Atau mungkin pula target tersebut tidak realistis.

Kalaupun semua tahapan telah tercapai, evaluasi tetap harus dilakukan untuk mengetahui apakah tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan dengan cara yang benar ? Jangan sampai tahapan-tahapan yang kita lalui dilakukan dengan jalan yang salah. Bila perlu, review atas dokumen perencanaan dapat dilakukan jika ternyata hasil evaluasi menunjukkan bahwa dokumen tersebut perlu diperbaiki/disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Jadi pada prinsipnya, hasil evaluasi ini haruslah menjadi masukan bagi semua pihak. Bagi Kepada Daerah sebagai top level management, hasil evaluasi ini menjadi masukan sampai sejauhmana kebijakan yang ada telah direalisasikan dan dapat men-drive segenap unsur Pemda. Bagi middle level management, hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas koordinasi antar lini di lingkungan Pemda. Sedangkan bagi low level management, hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan konsolidasi pelaksanaan teknis di lapangan.

Penutup

Uraian di atas semoga menjadi salah satu alternatif yang dapat anda pertimbangkan dalam pemilihan strategi migrasi open source di lingkungan Pemerintah Daerah anda.

Semoga bermanfaat.

Bandung, 28 Januari 2010

*) Tentang Penulis :

- Email : myakbar@gmail.com
- Blog : <http://myakbar.wordpress.com>



Strategi Migrasi Open Source di Lingkungan Pemerintah Daerah by [M. Akbar Pahla KS](#), is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License](#).

Permissions beyond the scope of this license may be available at <http://myakbar.wordpress.com/informasi-lisensi>